

**PERANAN BAGI HASIL PERTANIAN ANTARA PENGGARAP DAN
PEMILIK LAHAN TERHADAP PENINGKATAN DAN PENDAPATAN
MASYARAKAT DI DESA BONE KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

Kartina

Nim:10200111035

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, yang di susun oleh saudari Kartina, NIM : 10200111035, mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2016 M, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI), tanpa (dengan beberapa) perbaikan.

Makassar,

31 Maret 2016 M

21 Jumada Al-Akhar 1437 H

DAFTAR PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Muslimin Kara.,M.Ag

(.....)

Sekretaris : Dr. H. Abdul Wahab, SE.,M.Si

(.....)

Penguji I :Dr. Amiruddin K.,M.Ei

(.....)

Penguji II : Drs. Thamrin Logawali.,MH

(.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ambo Asse.,M.ag

(.....)

Pembimbing II :Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag

(.....)

Diketahui oleh:

/Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag

NIP. 19581022 198703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kartina

Nim : 10200111035

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan
Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan
Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten
Gowa

Dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 5 September 2016
Penyusun,

Kartina
NIM. 10200111035



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Kartina
Nim : 10200111035
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang ada di Desa Bone, Kec. Bajeng Kab. Gowa serta untuk mengetahui pandangan syariat Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dan mengetahui faktor yang mendorong masyarakat desa Bone melakukan bagi hasil pertanian, dan juga untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tersebut terhadap pendapatan masyarakat desa Bone.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, dan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu para petani penggarap, dan pemilik lahan di desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa majalah, buku, koran maupun dari website. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi.

Hasil penelitian, sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Bagi Hasil	7
B. Akad-Akad Yang Berkaitan Dengan Bagi Hasil	9
C. Akad-Akad Hasil Dalam Bidang Pertanian	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	31
B. Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Modal di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa	35
C. Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Bagi Hasil Yang Dianut Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa	43
D. Peranan Sistem Bagi Hasil Pertanian Terhadap Penghasilan Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa	49
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk yang sempurna di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya, karena akal dan rasionya. Hal ini diharapkan mampu melestarikan dan memelihara alam, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Dan sekaligus hamba Allah yang harus taat dan tunduk kepada-Nya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama. Untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan salah satunya adalah dengan bertani.

Salah satu pembangunan pertanian secara khusus adalah untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, dengan demikian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik bahkan pasar internasional.² Peningkatan produksi tersebut di arahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat mendorong peningkatan taraf hidup petani, selain itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk penghasil devisa

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII press, 2000), h. 11.

² Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 35

dan bahkan akan merupakan mata perdagangan yang dapat memperkecil devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor produk pertanian.

Indonesia adalah negara agraris dan banyak menyadari kebutuhan dari hasil pertanian, oleh karena itu titik sentral pembangunan ekonomi adalah pasar sektor pertanian dalam rangka mensejahterakan rakyat pada umumnya dan petani pada umumnya petani pada khususnya. Penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki modal pertanian maka diadakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap pertanian. Pada awal mulanya perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani tanpa mementingkan keuntungan yang akan didapatkan.

Hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah muzara'ah.³ Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya:

Muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁴

“Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik modal atau lahan dengan pekerja”.⁵ Perjanjian ini biasanya muncul karena terkadang ada petani yang memiliki modal namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak

³Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.99.

⁵Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), h.34

memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut. Dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau pengarap yang memiliki modal atau lahan dalam bercocok tanam. Seperti apa yang telah diungkapkan Sayyid dalam bukunya:

Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong menolong antara mereka, Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti betalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak.⁶

Masyarakat di desa Bone sebagian besarnya adalah penduduk yang memiliki lahan atau sawah pertanian. Sebagian besar penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun tak sedikit yang memiliki sawah yang banyak, akan tetapi tidak memiliki waktu serta kemampuan untuk mengelolanya.

Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelolah lahan pertanian, maka penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan.

Apabila seorang muslim memiliki lahan pertanian, maka dia harus memanfaatkan lahan tersebut. Dengan bercocok tanam Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkan lahan pertanian itu, sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah melarang keras disia-siakkannya

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* XI (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h.191

harta. Pemilik lahan itu dapat memanfaatkan dengan berbagai cara. Cara pertama diurus sendiri dengan ditanaminya tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara. Begitulah sampai keluar hasilnya, Cara semacam ini adalah cara yang terpuji, di mana pemiliknya akan mendapatkan pahala dari Allah tanaman yaitu bisa di manfaatkan oleh manusia, burung, dan binatang ternak. Cara kedua kalau dia tidak dapat mengurus sendiri maka menyuruh orang lain untuk menggarap lahan itu. Yakni orang lain yang mampu mengurus dengan bantuan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah lahan.

Praktek kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di desa Bone sudah lama berlangsung secara turun menurun, namun belum ada aturan yang ketat atau aturan yang secara rinci saat melakukan akad tersebut. Maka dari itu penyusun merasa tertarik untuk mengkaji sistem bagi hasil dan peranannya terhadap pendapatan masyarakat khususnya di desa Bone.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Sebelum menjelaskan lebih jauh dan lebih detail tentang *sistem bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan serta perannya terhadap pendapatan masyarakat di desa Bone kecamatan Bajeng ini*, terlebih dahulu penulis akan menguraikan fokus penelitian dari judul skripsi ini yaitu: **Peranan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Masyarakat**, penulis berusaha memaparkan secara gamblang bagaimana pemilik modal dan pengelola membagi hasil sesuai dengan syariat kemudian bagaimana peranannya terhadap masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah konsep bagi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat di desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa, apakah sesuai dengan syariat Islam?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama pertanian?
3. Apakah sistem bagi hasil pertanian berperan terhadap pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng KabupatenGowa?

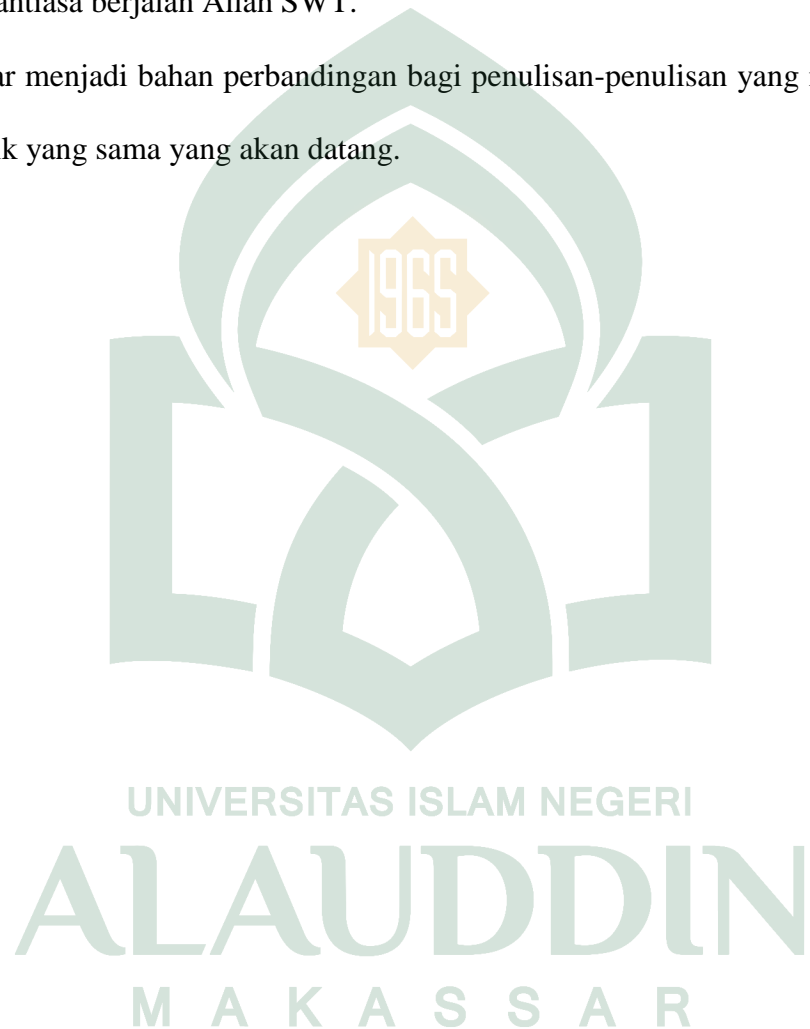
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang ada di Desa Bone, Kecataman Bajeng Kabupaten Gowa serta untuk mengetahui pandangan syariat Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bone, Kecamatan Bajeng, KabupatenGowa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat di desa Bone melakukan sistem bagi hasil pertanian.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh bagi hasil terdapat tingkat pendapatan masyarakat di desa Bone.

Adapun kegunaan penelitian:

1. Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat setempat tentang bagaimana sistem bagi hasil yang diatur oleh syariat Islam agar kita senantiasa berjalan Allah SWT.
2. Agar menjadi bahan perbandingan bagi penulisan-penulisan yang mempunyai topik yang sama yang akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KONSEP BAGI HASIL DALAM ISLAM

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharring* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁷

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup lokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai, dibayar melalui laba perusahaan, dan memberikan para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu dimana yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian *dividen* maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh keuntungan.⁸

Jika dalam suatu perusahaan, maka perolehan bagian keuntungan sering dianjurkan untuk meningkatkan tanggung jawab pegawai dan dengan demikian

⁷www.academiaedu.com

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.

meningkatkan produktivitas. Mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudlarabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul maal* telah dibayar kembali. “Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.”⁹

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi

⁹Cristopher Pass, *Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 537.

barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

2. Bentuk-bentuk akad yang berkaitan bagi hasil

Akad atau *al-aqd* yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁰ Ulama fiqh menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut.

¹⁰Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Uii Press, 2009), h. 18.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Qs. al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹¹

Ayat diatas menjelaskan tentang aqad yang harus dipenuhi, aqad dalam artian khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu perikatan/ perjanjian yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹² Aqad itu sendiri memiliki 3 rukun, yaitu: orang yang akad (*aqid*), sesuatu yang diaqadkan (*mauqud alaih*), dan shigat (ijab dan qabul). Aqad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad yang ditangguhkan.¹³ Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa secara umum prinsip bagi hasil secara umum yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *muzara'ah* dan *muzakah*. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-Maidah: I*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 106.

¹²Rachmat Syafei, "*Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

¹³Rachmat Syafei, "*Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*", h. 70.

digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sedangkan *muzara'ah* dan *al-muzakah* digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*plantation financing*).¹⁴

3. Akad-akad bagi hasil dalam bidang pertanian

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *Muzaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh rasulullah saw dan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa rasulullah saw pernah memberikan tanah *khaibar* kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara muzara'ah dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.

1. Muzaqah

Muzaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaqah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁵ Akad ini dianjurkan oleh agama islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

Adapun rukun-rukun *muzaqah* yaitu:

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 90.

¹⁵Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta:Gema insani, 2001), h.100

1. Pernyataan perjanjian (*shighat*), *shighat* ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan “siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan hasil sekian.” Dapat pula dalam bentuk *kinayah* (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
2. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad orang lain atau anak-anak.
3. Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
4. Pekerjaan disyaratkan yang bekerja adalah pekerjadengan sendirinya tidak boleh pemilik, karena ikut campur pemilik dalam bekerja maka kebebasan pekerja berkurang.

Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidakjujuran dalam perjanjian tersebut. Akad *musaqah* ini dianggap selesai apabila:

1. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
2. Meninggalnya salah satu yang berakat
3. Mambatalkan, baik dengan ucapan mauun dengan uzur

Menurut ulama hanafiah bahwa, akad *musaqah* dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur atas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adana salah satu pihak meninggal mapun karena adanya unzur yang melatar belakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu.¹⁶

2. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dan hasil panen.¹⁷ *Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukharabah*, namun terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

Muzara'ah: benih dari pemilik lahan

Mukhabarah: benih dari penggarap

Abdul Sami' Al-Mishri sendiri mengartikan *Muzara'ah* sebagai sebuah akad kerja sama pengelola lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal panen maka penggarap tidak menangun apapun tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan.¹⁸

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 48.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 99.

¹⁸Abdul Sami'al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, h. 110.

Pengertian diatas telah dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya 1/3, 2/3 atau menurut perjanjian diantara mereka. Dasar hukum dalam muzara'ah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)¹⁹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرِعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya:

Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari)²⁰

Kedua hadist tersebut menjelaskan tentang kerjasama dalam bidang pertanian, dan pemanfaatan atas lahan yang kosong agar diambil hasilnya. Rasulullah sendiri menganjurkan untuk kerjasama dalam bidang pertanian, dengan bagi hasil sesuai dari apa yang telah disepakati atau setengah dari hasil panen yang telah didapatkan.

Perjanjian dalam bidang pertanian dilakukan atas kesepakatan bersama, dengan akad

¹⁹Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), h. 173-174.

²⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14)*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010), h. 122-123.

yang telah ditentukan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pertanian adalah Qs. Al-An'am ayat 141.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahan:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.²¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan lahan yang kosong untuk pertanian dan perkebunan, dan menerangkan tentang diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dengan memberi upah/hasil sesuai dengan haknya. Selain daripada itu tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian. Dalam melakukan akad *muzara'ah* ada beberapa syarat dan rukun yang harus disepakati:

a. Syarat-syarat Muzara'ah

1. Berakal
2. Baliq

Adapun syarat-syarat yang menyangkut tentang tanah pertanian yaitu :

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat Al-An'am: 141* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h.

1. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu bisa digarap dan menghasilkan jika tidak potensial untuk ditanami karena tandus dan kering, maka Muzara'ah dianggap tidak sah.

2. Batas-batas tanah itu harus jelas.

3. Tanah itu diberikan sepenuhnya kepada petani untuk digarap,

Adapun syarat-syarat yang menyangkut dengan panen yaitu:

1. Pembagian hasil panen bagi kedua belah pihak harus jelas.

2. Hasil itu harus benar-benar milik bersama yang berakad, tanpa ada unsur dari luar.

3. Pembagian hasil panen itu ditentukan pada awal akad untuk menghindari perselisihan nantinya.

b. Rukun muzara'ah meliputi:

1. Pemilik tanah

2. Pemilik atau penggarap

3. Objek muzara'ah

4. Ijab dan kabul, dimana ijab dan kabul ini harus dilapalkan secara lisan oleh kedua belah pihak namun kabul bisa tidak dilapalkan secara lisan tapi bisa juga dalam bentuk tindakan secara langsung dari si penggarap.²²

c. Akibat Akad Muzara'ah

²²Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Edia Praama, 2000)

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Petani bertanggungjawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya peneuan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu dengan melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab petani, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
4. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama' berpendapat bahwa akad upah-mengupah (*ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

d. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Ulama' fiqih yang membolehkan akad *muzara'ah* mengatakan akad ini akan berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.
- 2) Menurut ulama madzhab Hanafi dan mazhab Hanbali, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat akad itu bisa diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.
- 3) Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pihak pemilik lahan, maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut. Uzur yang dimaksud antara lain:
 - a. Pemilik lahan terbelit utang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang bisa untuk melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan itu tidak boleh dijual sebelum panen.
 - b. Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melakukan pekerjaannya.

e. Dasar hukum muzara'ah

Dasar hukum akad muzara'ah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Abdillah

عن عبدالله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي خبير اليهود علي ان يعملوا ويزرعوا واولهم شطر ما خرج منها. (رواه البخاري)

Artinya:

“dari Abdullah r.a berkata: Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi kahaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.” (HR. Bukhari)

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar r.a

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليزرعها وليمنعها اخاه فان ابي فليمسك ارضه. (رواه البخاري)

Artinya:

“sesungguhnya Nabi SAW. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.” (HR. Bukhari)

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasa'i dari Rafi' r.a dari

Nabi SAW., beliau bersabda:

انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرعها ورجل استرى ارضا بذهب او فضة. (رواه ابو داود والنسائي)

Artinya:

“yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya, dan laki-laki yang diberi manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya, dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak.” (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i)

- d. Ijma’ ulama’, muzara’ah atas bagian merata dari hasil tanah, misalnya 1/2nya, 1/3nya atau 1/6nya atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui, jaiz hukumnya menurut ijmak yang meyakinkan dan dipastikan.²³
- f. Perbedaan Pendapat Tentang Muzara’ah
 - a. Ada perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya akad *muzara’ah* ini. Golongan pertama adalah golongan yang membolehkan atau tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar

عن ابن عمر ان انبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها
من ثمر او زرع. (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar: “sesungguhnya Nabi SAW., telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertanian (palawijaya).” (HR. Muslim)

- b. Golongan kedua berpendapat bahwa paroan sawah (*muzara’ah*) tidak sah atau dilarang. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan itu. Hadits itu ada dalam kitab hadits Bukhori dan Muslim, diantaranya:

²³Sa’di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2006), h. 508-509

عن ابن عمر ان انبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشرط ما يخرج منها
من ثمر او زرع. (رواه مسلم)

Artinya:

Rafi' bin Khadis berkata: “diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan sebagian tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian”. (HR. Bukhari)

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya hanya “ apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi SAW. dalam hadits tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.²⁴

Menurut ulama madzhab ada beberapa perbedaan pendapat tentang boleh dan tidaknya akad *muzara'ah*, yaitu:

- a. Menurut Imam Syafi'i, *muzara'ah* (mengerjakan tanah orang dengan memperoleh dari sebagian hasilnya), sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak diperbolehkan, karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya. Sebagian ulama mazhab Syafi'iyah membolehkan, sama dengan *musaqah* (orang upahan).

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Cet. 40; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), h. 302-303.

- b. Ulama-ulama Hanafiyah berkata: *muzara'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil, baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun yang mempunyai tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad: boleh.
- c. Ulama-ulama Malikiyah berkata: *muzara'ah* pada syara' ialah: suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang bibit dan alat dari orang lain. *Muzara'ah* yang dibolehkan ialah: berdasarkan upah.
- d. Ulama-ulama Hanbaliyah berkata: *muzara'ah* ialah: orang yang mempunyai tanah yang dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberikan kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya, sebagian hasil bumi itu, sepertiga atau seperdua dengan tidak ditentukan banyak sukatan.²⁵
- g. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap Muzara'ah

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh fiqih Islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad; sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah.

Di bawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk *muzara'ah* baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.

1. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

²⁵Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam(Tinjauan Antar Mazhab)*, Edisi II (Cet. II; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 425-426.

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih.

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh ahli fiqih:

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan oleh pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c. Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap tidak sah karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakalah pemilik tanah menghendaki.
- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.

- f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggungjawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- i. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di kebun dan di ladang) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.²⁶

2. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh ahli fiqih:

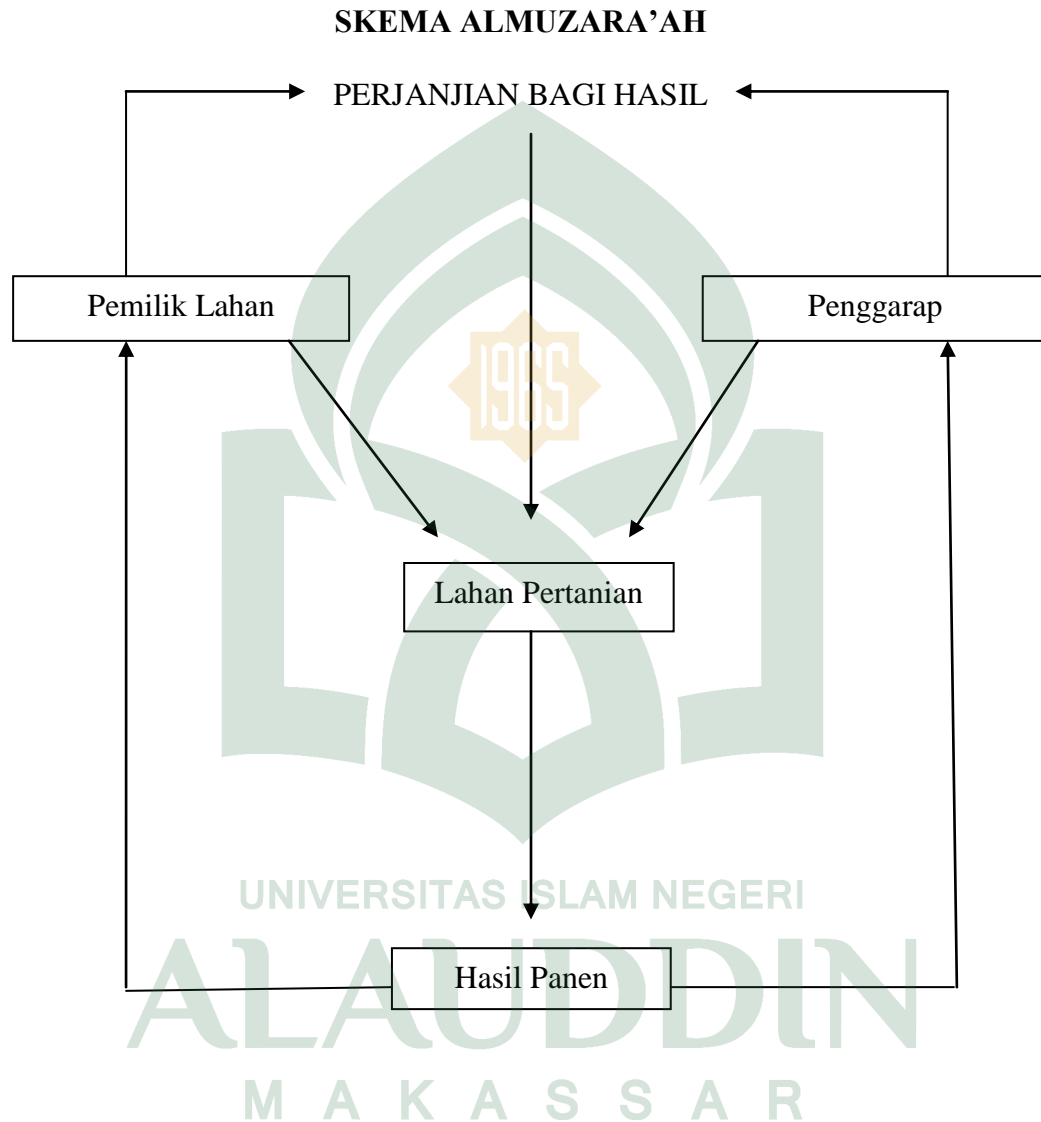
- a) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

²⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995), h. 286-287.

- b) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.
- c) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- d) Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah “ushri, akan dibayar oleh petani.
- e) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “Ushr” ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “kharaj”. Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
- f) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu “ushri”, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “ushri”, ushr akan dibayar oleh petani.
- g) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.²⁷

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1995), h. 288-289.

Secara umum, aplikasi skema *muzara'ah* dapat digambarkan sebagai berikut:



3. Mukharabah

Mukharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarapa dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani

penggarap. Perbedaan muzara'ah dan mukhabarah terletak pada benih tanaman. Dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih dari penggarap.²⁸Syarat dan rukun mukhabarah hampir serupa dengan akad muzara'ah yang telah dipaparkan sebelumnya, begitupun dengan dalil-dali yang mendukung serupa dengan akad muzara'ah, namun muzara'ah bersifat mengikat.



²⁸Rahman, Ghuftron Insani, dan Sapiudin, *Fihi Mu'amalah* (Semarang: Toha Putra, 2012) h. 188

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.³¹ Sedangkan lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Bone Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Pendekatan syar'i, mendekati masalah yang dibahas dengan berdasarkan pada sumber syariat Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi.
2. Pendekatan sosiologi, yakni mendekati masalah yang dibahas dengan melihat gejala atau interaksi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat di sekitar tempat penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan agar penelitian dapat diterima di kalangan masyarakat.

C. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.³²

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.³³ Atau data yang berasal dari data orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.³⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam usaha pengumpulan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode wawancara

³²Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42.

³³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119.

³⁴Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006), h. 160.

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.³⁵ Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.³⁶ Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.³⁷ Observasi dalam penelitian ini adalah sistem bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan serta perannya terhadap pendapatan masyarakat di desa Bone Kec. Bajeng.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *documen* yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

³⁵Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 137.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), h. 227.

³⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 115.

E. Instrumen Penelitian

Dengan melihat permasalahan yang hendak diukur dan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

1. Interview, yakni mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. Dokumentasi, yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan luas

Penelitian ini dilaksanakan di desa Bone Kec. Bajeng Kabupaten Gowa, luas wilayah desa Bone adalah 5.160 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki: 2.549 jiwa dan jumlah penduduk perempuan: 2.611 jiwa. Desa Bone merupakan desa yang berada di Kecamatan Bajeng, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Lempangan Kec. Bajeng
2. Sebelah Timur berbatas Desa Bonto Sunggu
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Borimatagkasa Kec Bajeng Barat
4. Sebelah Barat berbatas Desa Monco Balang Kec.Barombong

Luas wilayah desa dalam tata guna lahan, luas wilayah Desa Bone $\pm 3,05$ km² terdiri dari:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Non pertanian | : 170.993 ha |
| 2. Sawah | : 160.966 ha |
| 3. Ladang | : 20.000 ha |
| 4. Kolam dan tegalan | : 2.5 ha |
| 5. Tambang gol.C | : ± 0.50 ha |

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa Desa Bone Kec. Bajeng merupakan suatu daerah yang dijadikan lahan pertanian.

b. Keadaan iklim

Tinggi tempat dari permukaan air laut antara 46-200 M di atas permukaan laut. Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam setahun antara 135 hari s/d 160 hari serta suhu rata-rata setahun adalah 28 s/d 35°C

2. Keadaan Demografi

Desa Bone merupakan jumlah penduduk 5.160 jiwa Dengan jumlah kepala keluarga 1.343 yang tersebar di enam wilayah dusun, dimana jumlah penduduk laki-laki 2.549 jiwa dan 2.611 perempuan. untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Desa Bone dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1: komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki- laki	Perempuan	
Buka	390	413	803
Appa bone	646	626	1.272
Mannuruki	238	239	477
Ripangngainta	544	546	1.090
Ritayya	392	413	805
Paranga	339	374	713
Jumlah	2.549	2.611	5.160

Sumber : kantor Desa Bone 2015

Berdasarkan tabel 1, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dari enam wilayah dusun di desa bone jumlah keseluruhanya sebanyak 2.549, sedangkan

penduduk dengan jenis kelamin perempuan dari enam wilayah di desa Bone lebih banyak yakni 2.611 dari keseluruhan jumlah penduduk di Desa Bone yang berjumlah 5.160 jiwa.

a. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu sumber potensial suatu daerah karena memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, dimana sasarannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Bone dapat kita lihat pada tabel 2:

Tabel 2: keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Bone Kec.

Bajeng Kab. Gowa

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	102	4,896
2	Petani	467	22,419
3	Buruh	810	38,886
4	Karyawan	54	2,592
5	Wiraswasta	242	11,617
6	Pensiunan/LVRI	52	2,496
7	Sopir/tukang ojek	123	5,904
8	Honorar	54	2,592
9	Tni/polri	19	0,912
10	Pedagang	70	3,360
11	Tukang batu	84	4,032
12	Security	2	0,096
13	Pemulung	4	0,192
	Jumlah	2.083	100 %

Sumber: Kantor Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa, 2015

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bone memiliki alternatif pekerjaan selain bertani. Setidaknya karena wilayah Desa Bone berada pada jalur menghubungkan beberapa kecamatan dan kabupaten disamping itu di sekitar Desa Bone terdapat industri dan pabrik sehingga masyarakat banyak yang mengantungkan hidupnya sebagai karyawan swasta dan wirausaha.

3. Potensi Sumber Daya Petani

Keadaan alam di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa baik dilihat dari segi iklim maupun jenis tanah sangat cocok untuk petani pertanian. Para petani memilih menanam padi selain tanahnya cocok juga, karena biayanya yang tidak terlalu banyak, cara tanamnya juga tidak terlalu ribet serta petani dapat melakukan pekerjaan lain jika proses penanam padi telah selesai. Petani hanya memerlukan waktu paling lama 3 hari untuk menyelesaikan penanaman padi yang luas lahannya 3 are. Waktu panen padi yang memakan waktu + 3 bulan dimanfaatkan oleh para petani untuk bekerja serabutan.

Salah satu kendala yang dihadapi petani bercocok tanam adalah kondisi alam, seperti kemarau sulit untuk diatasi oleh para petani karena kurangnya sumber air dan penampungan air ataupun saluran irigasi sehingga akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat didalam mengeluarkan kebijakan dibidang pertanian. Mengingat luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Bone.

B. Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahandi Desa Bone Kec. Bajeng Kab Gowa

Bagi rakyat indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sendiri. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang. Jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (pemilik tanah pertanian).

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan ataupun untuk tempat tinggal, ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani yang memerlukan lahan untuk digarap untuk menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian bagi hasil pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, begitu pula yang terjadi di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa.

Berbicara tentang sistem bagi hasil utamanya antara pemilik modal dan penggarap dalam hal ini adalah petani padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa sebagai lokasi penelitian masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun menurun.

Manusia yang menempati suatu daerah tertentu yang nyata dan yang berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang berlaku dan dianut oleh masyarakat dan warga setempat. Begitu pula sistem bagi hasil yang di Desa Bone yang umumnya masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. Dimana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Sebelum melakukan perjanjian kerja sama khususnya dalam hal ini petani. Antara pemilik modal dan penggarap biasanya kedua belah pihak melakukan suatu pertemuan. Pertemuan itu hanya bersifat non-formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu baik di kebun maupun di suatu tempat-tempat tertentu.

Di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa sendiri biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari sipenggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik modal yang bersedia lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya dari pemilik lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari pemilik lahan atau modal yang bersedia memberikan modalnya kepada sipenggarap untuk dikelola dengan hasil imbalan dengan tertentu setelah panen, namun hasil penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari petanipenggarap dikarenakan petani penggarap yang lebih membutuhkan dana dalam melakukan suatu perjanjian pertanian.

Ada beberapa yang melatarbelakangi penawaran yang ditawarkan oleh kedua belah pihak antara lain:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penawaran datangnya dari petani penggarap yaitu:
 - a. Tidak memiliki modal sama sekali dalam menanam suatu jenis tanaman pertanian seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit, biaya penawaran dan lain-lain.
 - b. Memiliki modal namun tidak memiliki tanah untuk ditanami.
 - c. Memiliki modal dan lahan namun modal yang dimiliki dirasa tidak cukup dalam hal pembelian bibit, perawatan dan pemeliharaan.

Dari beberapa faktor di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa petani penggarap sangat bergantung pada petani pemilik lahan dalam menanam suatu jenis tanaman tertentu. Banyaknya faktor yang menjadi penghambat petani penggarap dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya dalam segi permodalan tapi juga dalam menanam suatu jenis tanaman tertentu. Banyak faktor yang menjadi penghambat petani penggarap dalam hal melakukan penanaman yang bukan hanya dalam hal segi permodalan tapi juga dalam hal pembelian bibit dan perawatan sehingga penawaran kepada pemilik modal yang berupa bentuk kerja sama sangat diperlukan jika petani penggarap ingin melakukan penanaman.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi datangnya penawaran yang dari pemilik modal biasanya yaitu:

- a. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan dalam mengelola lagi tanaman tersebut karena memiliki banyak pekerjaan diluar pertanian misalnya karena dia adalah seorang pegawai negeri, pengusaha atau lainnya.
- b. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan karena sudah menanam suatu jenis tanaman yang sedang dia kelola dan pelihara sehingga tidak memiliki banyak waktu.
- c. Petani penggarap yang ditawarkan oleh petani modal adalah dari kerabat keluarga sendiri.

Jika melihat faktor di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa disamping petani penggarap yang sangat membutuhkan petani, pemilik modal dalam hal pembelian bibit, permodalan dan pemeliharaan, petani pemilik modal juga sangat membutuhkan petani penggarap karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor di atas. Jadi perjanjian ini adalah bentuk kerja sama antara petani pemilik modal/lahan dengan petani penggarap yang dimana kedua belah pihak yang bersangkutan.

Jika petani pemilik modal dan petani penggarap masing-masing sudah bersedia dimana petani penggarap sudah bersedia menawarkan waktu dan tenaganya dalam mengelola suatu jenis tanaman tertentu dan petani penggarap juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah bisa disepakati antara keduanya. Namun hal yang perlu disepakati selanjutnya adalah beberapa jumlah benih yang harus ditanam misalnya dalam hal ini beberapa karung padi yang akan di tanam

kedua belah pihak, siapa yang menanggung biaya pembeli bibit, siapa yang menanggung biaya perawatan misalnya pembelian pupuk, pembelian obat-obatan dan apakah perawatan dilakukan secara bersama-sama atau hanya ditanggung oleh penggarap saja.

3. Bentuk-bentuk kerja sama

Jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dengan petani penggarap adalah semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik modal maka yang akan terjadi adalah pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian mulai dari biaya pembelian bibit, pemupukan dan penyemprotan hama sedangkan biaya operasional ditanggung petani penggarap. Kemudian hasil panen akan dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap dengan perbandingan 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk petani penggarap adapun petani yang seluruh hasil panennya diberikan semuanya kepada sipemilik modal dan tergantung dari sipemilik modal berapa yang harus diberikan kepada sipenggarap.

Apabila bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga. Namun apabila kegagalan panen itu akibat dari kelalaian petani penggarap maka akan diberikan sanksi yang berupa pengucilan atau tidak adanya lagi bentuk

kerja sama yang akan datang baik dari pemilik modal/lahan yang sekarang maupun dari pemilik modal yang lain.

Jika bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak adalah seluruh pembiayaan penanaman akan ditanggung bersama oleh petani penggarap, mulai dari pembelian bibit, biaya sewa traktor, dan biaya operasional lainnya sedangkan pemilik modal hanya menanggung pupuk dan obat penyemprotan hama. Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap, dengan perbandingan 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk petani penggarap.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak.

Meskipun peraturan sistem bagi hasil itu bersifat tidak tertulis namun karena sistem bagi hasil itu sudah dianut dan dilakukan secara turun temurun maka masing-masing pihak antara petani pemilik modal dan petani penggarap sudah saling mengetahui cara-cara sistem bai hasil tersebut. Begitupun sangsi yang diberikan yang meskipun hanya bersifat sangsi sangat adat dan tidak tertulis, namun sebagaimana warga desa pada umumnya yang masih sangat memegang teguh adat dan perjanjian yang dilakukan tidak ada warga desa yang beranimelanggar perjanjian. Sangsi-sangsi

yang diberikan apabila salah satu mnyalahi sistem perjanjian itu berupa sangsi pengucian dari masyarakat, peringatan dari tokoh adat maupun berupa petani pemilik modal yang ada pada desa tersebut tidak ada lagi yang mau melakukan perjanjian dengan sipelanggar perjanjian yang ada.

Kalaupun masih ada salah satu pihak yang melanggar ataumenyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat mambatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan atau pembatalan pejanjian oleh salah satu pihak yang menyimpang diatur dalam Al-Qur'an, yakni QS, At-Taubah: 7 yang berbunyi:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Terjemahan:

Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam? Maka selama mereka Berlaku Lurus kepadamu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Makna dari ayat tersebut adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, jika masing-masing dari kedua belah pihak mentaati dan mematuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama maka perjanjian tersebut boleh diteruskan, namun jika ada salah satu pihak dari keduanya yang menyimpang atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan secara sepihak, sebagaimana bunyi ayat yang menyatakan: “maka selama mereka

berlaku lurus kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka.” Jadi selama salah satu pihak mentaati dan mematuhi kesepakatan yang ada, maka pihak yang lain juga harus mentaati dan mematuhi kesepakatan perjanjian.

4. Jangka waktu perjanjian bagi hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa khususnya antara pemilik modal dan penggarap, dalam hal ini petani padi, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini atau sesudah pemanenan sudah selesai maka perjanjian dianggap juga sudah berakhir atau selesai. Adapun jika penanaman dilakukan dua kali maka pemilik modal dan penggarap harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan dilakukan apakah sama atau tidak.

C. Tinjauan Syari'at Islam Terhadap Bagi Hasil Yang Dianut Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam agama Islam menganjurkan tiga sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu al-muzaraah. Sistem ini harus dipenuhi oleh petani pemilik modal/lahan atau penggarap jika ingin melakukan suatu kerja sama agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam seperti riba, gharar dan judi. Sebagaimana diketahui bahwa riba adalah hal yang sangat dilarang dalam ajaran agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan riba dan jika memang sudah terlanjur melakukan sebaiknya meninggalkan hal tersebut (riba). Karena riba termasuk tindakan dosa dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi jika digunakan dalam sistem bagi hasil di bidang pertanian tentu hal ini akan merugikan kesemua pihak.

1. *Muzara'ah*

Sebagaimana kita ketahui bahwa muzara'ah adalah salah satu sistem kerja sama yang diajarkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian. Muzara'ah sendiri berpengertian sebagai kerja sama pengelola pertanian antara pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik modal/lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari muslim yang artinya: "Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi ditegah para sahabat dan kaum setelahnya." Ibnu "Abbas menceritakan bahwa Rasulullah saw bekerja sama (muzara'ah) dengan penduduk khaibar ntuk berbagi hasil panen atas panen, makanan dan buah-buahan." Bahwa Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperepat."

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam sistem muzara'ah itu pemilik modal hanya memberikan lahan pertaniannya kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara, sebagai imbalan penggarap berhak mendapatkan imbalan tertentu dari hasil panen. Dalam hal ini benih itu dari pemilik lahan sedangkan pemeliharaan dan penyiraman ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Adapun apabila benih itu disediakan oleh petani pemilik penggarap diartikan sebagai mukharabah. Tapi yang perlu diketahui adalah meskipun benih itu dari sipemilik modal namun pemeliharaan dan penyiraman dalam hal ini menyangkut misalnya biaya pupuk, biaya obat-obatan dan biaya yang lain ditanggung sendiri oleh petani penggarap. Dimana sistem bagi hasil yang terjadi sangat tergantung oleh kedua belah pihak sebelum penanaman dilakukan.

Di Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa sendiri sebagai lokasi penelitian sistem bagi hasil yang terjadi adalah petani pemilik modal memberikan modalnya atau lahannya kepada petani sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara. Adapun jika benih berasal dari pemilik modal maka itu sangat tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik modal memberikan lahannya kepada petani penggarap dan pembeli benih kemudian petani penggarap sendiri yang mengelola dan memelihara benih tersebut sampai panen tiba, dimana biaya-biaya seperti pupuk, biaya obat-obatan dan biaya penyiraman ditanggung oleh petani penggarap sendiri (muzara'ah). Adapun sistem bagi hasil yang terjadi apabila sudah panen yaitu biasanya ada pemilik modal yang mengeluarkan dulu biaya pembelian bibit dan biaya perawatan lainnya

baru dibagi dua tapi sistem bagi hasil ini sangat tergantung oleh kedua belah pihak sebelum penanaman dilakukan.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan sistem bagi hasil yang diajarkan oleh syariat Islam sudah sesuai. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem di atas sudah sesuai dengan sistem muzara'ah yang dianjurkan oleh syari'at Islam dalam bidang pertanian.

2. *Al-musaqah*

Musaqah juga merupakan sistem kerja sama yang dianjurkan dalam Islam dibidang pertanian. Musaqaq sendiri sudah hampir sama dengan akad muzara'ah hanya saja bentuknya yang lebih sederhana yaitu si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sedangkan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil tertentu.

Sistem bagi hasil ini semua biaya seperti biaya pembelian bibit, biaya pupuk, obat-obatan ditanggung seluruh oleh petani pemilik modal sedangkan petani penggarap hanya menanggung biaya penyiraman dan biaya pemeliharaan yang hanya menanggung biaya penyiraman dan biaya pemeliharaan yang hanya lebih bersifat tenaga. Namun dalam sistem perjanjian ini tanggung jawab, skill dan keuletan petani penggarap sangat diperlukan untuk keberhasilan panen. Ini dikarenakan yang mengetahui tentang penyiraman dan pemeliharaan adalah petani penggarap itu sendiri sedangkan petani pemilik modal hanya sebagai penyedia dana.

Di Desa Bone Kec.Bajeng Kab.Gowa sendiri adalah petani pemilik modal dan petani penggarap yang melakukan sistem ini bedanya petani penggarap tidak mendapatkan bagi hasil dari tanaman yang dipeliharakan namun mendapat upah dari hasil kerjanya.

Sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa bone kec. Bajeng kab. Gowa dalam akad ini sangat beragam, ada petani pemilik modal yang hanya mengambil modal yang telah dikeluarkan selama penanaman kemudian dari hasil penjualan dari hasil panen seluruhnya diberikan kepada petani penggarap. Adapula yang membagi dua hasil panen dan ada pula yang membagi sepertiga, semuanya tergantung dari hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Penjelasan diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem-sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Bone kec. Bajeng bermacam-macam tapi sistem ini sama dengan sistem musaqah yaitu sistem bagi hasil yang di ajurkan agama Islam. Meskipun sistem bagi hasil yang diajurkan agama Islam tidak persis sama dengan yang dilakukan, dari segi manfaat yang tujuan yang ingin dicapai bersama, sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Bone namun jika dilihat dari cara-cara yang dilakukan masyarakat desa Bone sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan agama Islam.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi sistem bagi hasil yang diajarkan agama Islam dengan sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Bone Kec. Bajeng. Tidak sama persis yaitu:

1) Faktor kebiasaan

Faktor kebiasaan ini merupakan faktor yang pertama mengapa masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng tidak melakukan bagi hasil seperti apa yang dianjurkan agama Islam. Mereka hanya melakukan sistem yang mereka lakukan secara turun menurun karena mereka sudah merasa mudah jika sistem bagi hasil yang dilakukan.

2) Faktor ketidaktahuan

Salah satu faktor mengapa masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng tidak menerapkan sistem bagi hasil seperti yang dianjurkan agama Islam adalah karena ketidaktahuan mereka seperti apa sistem bagi hasil, bagaimana cara-cara sistem bagi hasil yang dianjurkan agama Islam itu, mereka tidak mengetahui secara apa pastinya dan jika mereka ingin mempelajarinya mereka merasa sulit karena kurang bersedianya fasilitas yang ada disamping pendidikan mereka yang kurang memadai.

Meskipun masyarakat Desa Bone tidak mengetahui bahwa apakah sistem bagi hasil yang mereka anut, yang sudah mereka lakukan secara turun menurun sesuai dengan ajaran agama Islam atau tidak? mereka hanya melakukan sistem perjanjian dengan tujuan saling tolong menolong dengan petani yang memiliki modal/lahan dan

petani yang tidak memiliki modal dalam hal bidang pertanian. Agama Islam sendiri mengajurkan kepada penganutnya untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sesama kaum muslimin kita sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sedangkan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan kemungkaran dilarang oleh agama Islam. Tolong menolong dalam hal kebaikan mencakup banyak aspek terkhusus dalam hal ini termasuk dalam bidang pertanian yakni tolong menolong dalam kerja sama antara petani penggarap dan petani pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama nantinya setelah panen.

D. Peranan Sistem Bagi Hasil Pertanian Terhadap Penghasilan Masyarakat Desa Bone Kec. Bajeng Kab. Gowa.

a. Analisis Biaya Produksi Pertanian

Analisis biaya produksi pertanian adalah analisis biaya yang dikeluarkan selama proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku sampai pada penjualan

hasil produksi selama satu periode panen. Biaya ini meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan melalui proses produksi yang dilakukan oleh petani dan berpengaruh terhadap volume produksi. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang sifatnya tetap oleh pengusaha walaupun proses produksi tidak berjalan dan tidak berpengaruh terhadap volume produksi. Yang termasuk biaya variabel dalam hal ini upah tenaga kerja. Sedangkan yang termasuk biaya tetap yaitu pemeliharaan, pupuk dan obat-obatan.

b. Biaya Variabel Dan Biaya Tetap

1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja terdiri dari 1-2 orang tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga. Pemberian upah tenaga kerja dalam keluarga didasarkan atas pemberian upah luar keluarga karena tidak ada pemberian uang yang jelas secara langsung kepada tenaga kerja dalam keluarga. Pemberian upah tenaga kerja diberikan perhari karena kerja ini karena masa tanam hanya berlangsung selama 2 hari. Upah tenaga kerja sebesar Rp. 40.000 perhari tidak ditanggung makan.

2. Biaya Tetap

Biaya tetap pada hal ini terdiri dari sewa taktor untuk membajak, biaya pembelian pupuk, biaya obat-obatan, sewa mesin dross saat panen.

Tabel 3: jenis dan nilai biaya pada sistem bagi hasil pertanian desa bone kec.

Bajeng kab. Gowa dengan luas lahan 3 are

No	jenis biaya	nilai biaya Rp
1. Biaya variabel		
	➤ Tenaga kerja upahan dan penanaman	40.000 / hari
	➤ Tenaga kerja upahan saat panen	40.000 / hari
2. Biaya tetap		
	➤ Sewa traktor untuk membajak sawah	150.000
	➤ Bibit	160.000
	➤ Biaya pembelian pupuk	100.000
	➤ Biaya pembeliann obat-obat pestesida	70.000
	➤ Sewa mesin dross(penggilingang padi)	Disesuaikan hasil panen setiap 10 ember hasil panen 9
	menjadi bagian petani dan 1 bagian pemilik mesin dross.	

Sumber : hasil oleh angket 2015

Berdasarkan tabel 3 maka penelitian dapat merincikan total biaya yang dikeluarkan petani penggarap dan pemilik modal,sesuai dengan akad perjanjian yaitu:

1. *Muzara'ah*

Pengeluaran petani penggarap

2 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari =Rp 160.000

2 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari =Rp 80.000

Sewa traktor =Rp 150.000+

Total Biaya =Rp 390.000

Pengeluaran pemilik modal

Bibit	= Rp 160.000
Pupuk	= Rp 100.000
Obat-obatan pestisida	= <u>Rp 70.000+</u>
Total biaya	= Rp 330.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 390.000 + Rp 330.000 = Rp 720.000. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang di pakai adalah sama rata atau 50 : 50 dimana yang diperoleh petani penggarap dengan petani pemilik modal adalah sama rata.

2. Mukharabah

Pengeluaran petani penggarap

2 orang tenaga kerja saat menanam untuk 2 hari	= Rp 160.000
2 orang tenaga kerja saat panen untuk 1 hari	= Rp 80.000
Bibit	= Rp 160.000
Sewa traktor	= <u>Rp 150.000+</u>
Total Biaya	= Rp 550.000

Pengeluaran pemilik lahan

Pupuk	= Rp 100.000
Obat-obatan pestisida	= <u>Rp 70.000 +</u>
Total Biaya	= Rp 170.000

Jadi total biaya untuk satu kali periode panen adalah Rp 550.000 + Rp 170.000 = Rp 720.000. Dalam hal ini sistem bagi hasil yang pakai adalah 60 : 40 dimana yang diperoleh petani penggarap sebesar 60% sedangkan pemilik modal 40%.

Tabel 04 : Daftar petani penggarap dan pemilik modal yang melakukan sistem bagi hasil muzara'ah.

No	Nama Petani Penggarap	Nama Petani Pemilik Modal	Luas Lahan	Hasil Panen Rata-Rata	Hasil Panen Penggarap
1	Dg. Tinri	Irwan Hana, Sh	3 are	28 karung	50%
2	Rahim Dg. Boko	Hj. Hamka	3 are	27 karung	50%
3	Sule Dg. Tiro	Drs. Anwar	3 are	28 karung	50%
4	Pawa	Dg. Rappi	3 are	28 karung	50%
5	Dg. Di'do	Dg. Bani	3 are	27 karung	50%
6	Bakri	Hj. Intan	3 are	27 karung	50%
7	Roce' Dg. Cini	Faisal	3 are	27 karung	50%
8	Dg. Raja	Mansyur	3 are	26 karung	50%
9	Dg. Nappu	Dg. Sija	3 are	28 karung	50%
10	Maruddin	Dg. Sari	3 are	28 karung	50%
11	Dg. Belling	Dg. Ngago	3 are	27 karung	50%
12	Dg. Janji	Dg. Bollo	3 are	28 karung	50%

Sumber : hasil olah angket 2015

Tabel 05: daftar petani penggarap dan pemilik modal yang melakukan sistem bagi hasil mukharabah.

No	Nama Petani Penggarap	Nama Petani Pemilik Modal	Luas Lahan	Hasil Panen Rata-Rata	Hasil Panen Penggarap
1	Sanu Dg. Nyampa	Farida	3 are	26 karung	60%
2	Dg. Rampa	Drs. Anwar	3 are	27 karung	60%
3	Jama Dg. Nai	Dg. Lebu	3 are	28 karung	60%
4	Mamur	H. Jamal	3 are	28 karung	60%
5	Dg. Limpo	Dg. Rapi	3 are	28 karung	60%
6	Dg. Nanring	Dg. Naba	3 are	27 karung	60%
7	Dg. Tompo	Dg. Bali	3 are	28 karung	60%
8	Dg. Gassing	Dg. Basarang	3 are	27 karung	60%

Sumber : hasil angket 2015

Dari hasil angket tersebut diketahui bahwa biaya total produksi yang dikeluarkan dalam satu periode panen padi yang luas lahannya \pm are adalah 720.000.- dengan nilai hasil panen rata-rata sebanyak 27,5 karung setelah dikurangi dengan sewa mesin dros dengan nilai jual setelah melalui tahap pengeringan, tahap pembersihan dan proses penggilingan padi sebesar Rp 3.500,000,-, hasil inilah yang kemudian akan dibagi oleh petani penggarap dengan petani pemilik modal jika dihitung dalam nilai rupiah.

- Jika perjanjiannya adalah muzara'ah maka pembagiannya adalah 50 : 50

Untuk petani penggarap:

$$\begin{array}{l} \text{Bagian yang diperoleh} \\ \text{petani penggarap sebesar} \end{array} = \frac{3.500.000}{2} = 1.750.000$$

$$\text{Keuntungan yang diperoleh} = \text{Hasil panen} - \text{Biaya Produksi}$$

$$\text{Petani penggarap sebesar} = 1.750.000 - 390.000 = 1.360.000$$

$$\text{Keuntungan perbulan} = \frac{1.360.000}{3} = 453.333$$

$$\begin{array}{l} \text{Peranan terhadap penghasilan} \\ \text{Petani penggarap} \end{array} = \frac{453.333}{\text{ump}} \times 100\%$$

$$= \frac{453.333}{1.200.000} \times 100\% = 37,78$$

Untuk petani pemilik modal:

$$\begin{array}{l} \text{Bagian yang diperoleh} \\ \text{Petani pemilik modal sebesar} \end{array} = \frac{3.500.000}{2} = 1.750.000$$

$$\text{Keuntungan yang diperoleh} = \text{Hasil Panen} - \text{Biaya Produksi}$$

$$\text{Petani pemilik modal sebesar} = 1.750.000 - 330.000 = 1.420.000$$

$$\text{Keuntungan perbulan} = \frac{1.420.000}{3} = 473.333$$

$$\begin{array}{l} \text{Peranan terhadap penghasilan} \\ \text{Petani pemilik modal} \end{array} = \frac{473.333}{\text{Ump}} \times 100\%$$

$$= \frac{473.333}{1.500.000} \times 100\% = 31,55\%$$

➤ **Bila Perjanjian Adalah Mukharabah Maka Pembagiannya Adalah 60 : 40**

Untuk petani pemilik penggarap:

$$\begin{array}{ll} \text{Bagian yang di peroleh} & = \frac{60}{100} \times 3.500.000 = 2.100.000 \\ \text{Petani penggarap sebesar} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Keuntungan yang diperoleh} & = \text{Hasil Panen} - \text{Biaya Produksi} \\ \text{Petani penggarap sebesar} & = 2.100.000 - 550.000 = 1.550.000 \end{array}$$

$$\text{Keuntungan perbulan} = \frac{1.550.000}{3} = 516.667$$

$$\begin{array}{ll} \text{Peranan terhadap penghasilan} & = \frac{516.667}{\text{ump}} \times 100\% \\ \text{Petani penggarap} & \\ & = \frac{516.667}{1.500.000} \times 100\% = 34,44\% \end{array}$$

Untuk petani pemilik modal:

$$\begin{array}{ll} \text{Bagian yang diperoleh} & = \frac{40}{100} \times 3.500.000 = 1.400.000 \\ \text{Petani pemilik modal sebesar} & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Keuntungan yang diperoleh} & = \text{Hasil Panen} - \text{Biaya Produksi} \\ \text{Petani pemilik modal sebesar} & = 1.400.000 - 170.000 = 1.230.000 \end{array}$$

$$\text{Keuntungan perbulan} = \frac{1.230.000}{3} = 410.000$$

$$\begin{array}{ll} \text{Peranan terhadap penghasilan} & = \frac{410.000}{\text{ump}} \times 100\% \\ \text{Petani pemilik modal} & \\ & = \frac{410.000}{1.500.000} \times 100\% = 27,333\% \end{array}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan bagi hasil pertanian di desa bone kec. Bajeng bila dirata-ratakan mencapai 31% dari penghasilan rata-rata rumahan tiap bulannya mencapai UMP yaitu sebesar 1.500.000,- kebanyakan masyarakat petani juga mengatakan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini terbukti dari hasil olah angket yang ada pada tabel 02. Dan dari hasil tersebut semua responden mempunyai pekerjaan selain dari bertani. Seperti buruh, security, penjual dan berkebun.

Berdasarkan penafsiran tersebut di atas dapat diberikan bahwa hasil panen yang diperoleh petani di desa bone kec. Bajeng dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan selain itu pula mereka dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Desa Bone terbukti dari hasil panen dan bila dirata-ratakan memberi tambahan \pm Rp462.000/ bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kab Gowa ini memiliki bentuk yang beragam. Namun yang perlu diketahui adalah bentuk sistem bagi hasil yang ada sangat tergantung dari kesepakatan itulah bentuk sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya sistem yang mereka pakai sesuai dengan syariat islam, yaitu sistem muzara'ah dan mukhabarah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dikarenakan para pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian, pihak petani penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan, karena disalah satu pihak antar petani penggarap dan pemilik lahan tidak mempunyai modal yang cukup sehingga melakukan kerjasama dalam bidang pertanian.
3. Hasil panen dan penjualan hasil panen yang diperoleh petani di Desa Bone Kec. Bajeng dapat membantu atau memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini, dan sangat berperan dalam pendapatan masyarakat Desa Bone, hasil panen tersebut memberikan

kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap di Desa Bone.

B. Saran-Saran

Dari penelitian tersebut maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

1. Untuk para pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut.
2. Untuk para petani, agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan dan disepakati, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah disepakati kepada pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fatul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 14*, cet. Ke-2, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Oralindo Persada, 2008.
- Basyir, Ahmad Ashar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surakarta: Media Insani Publishing, 2007). Djohanputri, Bramantio, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, Jakarta: PPM, 2008.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Edia Pratama, 2000.
- Karim Andiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Khalid Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Mankiw, N. Gregory. *Teori Makro Ekonomi*, Edisi IV Jakarta: Erlangga 2000.
- Masyhuri. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Off set, 2006.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mubyarto. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Pass, Cristopher. *Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Putong, Iskandar. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, edisi 2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah XI*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sulisyanto. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Winardi. *Proses Ekonomi*. Bandung: CV. Tarsito, 1993.
- Yayla, Atilla (ed). *Islam, Civil Society and Market Economy*. Turki: Liberte Books, diterjemahkan oleh Friedrich-Naumann-Stiftung dengan judul, *Islam Masyarakat Sipil, dan Ekonomi Pasar*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2004.*

L

A

M

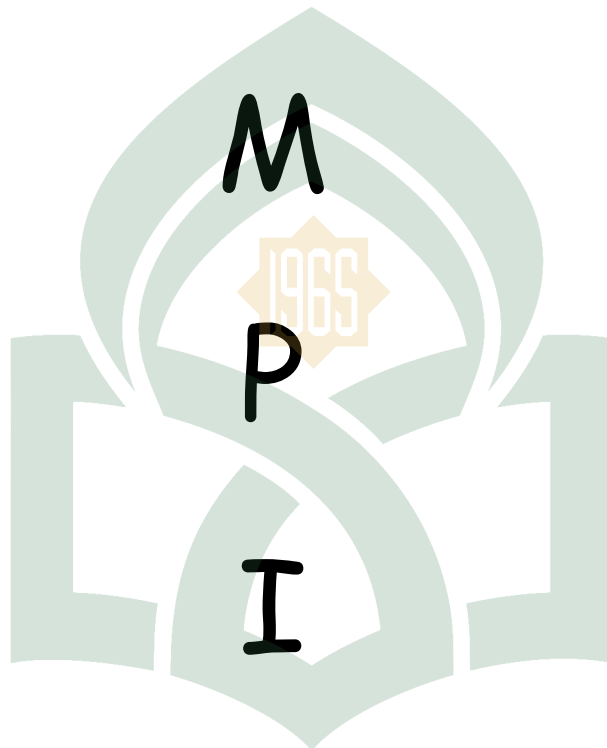
P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

Kartina lahir pada tanggal 7 november 1993 di Malaysia, anak ke 2 dari 4 bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Abd.Karim dan Bau Ranti Penulis menempuh pendidikan di sekolah Dasar Negeri 145 tuju kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. Di sekolah tersebut penulis menimba ilmu selama 6 tahun pada tahun 2005. Pada tahu yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 2 Bontotiro. Kab. Bulukumba selesai pada tahun 2008 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bontotiro selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2011. Setelah lulus di SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Jurusan Ekonomi Islam (S1) selama 4 tahun hingga selesai pada tahun 2016. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah SWT sehingga bisa menimba ilmu yang merupakan bekal. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dengan baik dan dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoakan dan serta mendukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R